

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.2. *Green Accounting*

2.2.1. *Pengertian Green Accounting*

Akuntansi hijau (*Green Accounting*) adalah proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terhadap objek, transaksi, peristiwa, atau dampak dari aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta korporasi itu sendiri dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi agar dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan dan nonekonomi (Andreas Lako, 2018). Pemahaman tersebut merujuk pada teori atau model tiga pilar dasar dari bisnis yang digagas oleh Elkington (1997, 2001).

Arfan Ikhsan dalam bukunya *Akuntansi Lingkungan dan penerapannya* (2008:13) mendefinisikan bahwa :

“*Green accounting atau environmental accounting* merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan.”

Sedangkan Andreas Lako mengungkapkan dalam bukunya *Akuntansi Hijau* (2018:99) menjelaskan bahwa akuntansi hijau (*green accounting*) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang utuh, terpadu, dan relevan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan non-ekonomi”

Berdasarkan definisi tersebut diatas, tujuan dari akuntansi hijau dan pelaporan akuntansi hijau adalah untuk menyajikan informasi akuntansi keuangan (ekonomi), informasi akuntansi sosial, dan informasi akuntansi lingkungan secara terpadu dalam satu paket pelaporan akuntansi agar bisa digunakan para pihak yang berkepentingan dalam penilaian dan pengambilan keputusan investasi, ekonomi, manajerial, dan lainnya.

2.2.2. Tujuan *Green Accounting*

Arfan Ikhsan (2008) menyatakan bahwa tujuan dari *green accounting* adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). *Green accounting* diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Penerapan dan pengembangan *green accounting* memiliki beberapa maksud dan tujuan yang sangat signifikan terhadap lingkungan, yaitu :

1. Mendorong pertanggung jawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan.

2. Membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks hubungan entitas dengan masyarakat dan terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat (*activist*) atau penekan (*pressure group*) terkait isu lingkungan.
3. Memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari kelompok dan individu, seiring dengan tuntutan etis dari investor yang semakin meningkat.
4. Mendorong konsumen untuk membeli produk hijau dan dengan demikian membuat entitas memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan entitas yang tidak melakukan pengungkapan.
5. Menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup.
6. Mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tantangan dari masyarakat.

2.2.3. Karakteristik *Green Accounting*

Andreas Lako (2018:102) menyebutkan bahwa terdapat tiga karakteristik kualitatif khusus dari informasi akuntansi hijau yang sangat bermanfaat dalam evaluasi penilaian pengambilan keputusan bagi para pemakai yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yaitu informasi akuntansi yang disajikan memperhitungkan semua aspek informasi entitas, terutama informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan entitas, serta biaya-manfaat dari dampak yang ditimbulkan.

2. Terintegrasi dan Komprehensif, yaitu informasi akuntansi yang disajikan merupakan hasil integrasi antara informasi akuntansi keuangan dengan informasi akuntansi sosial dan lingkungan yang disajikan secara komprehensif dalam satu paket pelaporan akuntansi.
3. Transparan, yaitu informasi akuntansi terintegrasi harus disajikan secara jujur, akuntabel, dan transparan agar tidak menyesatkan para pihak dalam evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan ekonomi dan non ekonomi.

2.2.1. Jenis Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan dari sisi pengguna dibedakan menjadi tiga jenis (Fasua, 2011):

1. Laba Akuntansi Nasional Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi pendapatan nasional mengacu pada akuntansi sumber daya alam, menyajikan informasi statistik suatu negara tentang kualitas dan nilai konsumsi sumber daya alam, yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.
2. Akuntansi Keuangan Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan mengacu pada penyusunan laporan akuntabilitas lingkungan untuk pengguna eksternal disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.
3. Akuntansi Manajemen Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen mengacu pada proses bisnis dengan pertimbangan penentuan biaya, keputusan investasi modal, dan evaluasi kinerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan.

2.2.5. Alasan Penerapan *Green Accounting*

Aktivitas-aktivitas dalam pelaksanaan green accounting tentunya mengeluarkan biaya. Aktivitas tersebut merupakan biaya yang harus dibebankan\ oleh perusahaan yang timbul bersamaan dengan penyediaan barang dan jasa kepada konsumen. Dengan beban yang telah dialokasikan diharapkan akan membentuk lingkungan yang sehat dan terjaga kelestariannya.

Kinerja lingkungan merupakan salah satu pengukuran penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Beberapa alasan yang dapat mendukung pelaksanaan akuntansi lingkungan antara lain (Fasua, 2011):

1. Biaya lingkungan secara signifikan dapat dikurangi atau dihilangkan sebagai hasil dari keputusan bisnis, mulai dari perubahan dalam operasional dan pemeliharaan untuk diinvestasikan dalam proses yang berteknologi hijau serta untuk perancang-an kembali produk yang dihasilkan.
2. Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan akan diabaikan.
3. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk.
4. Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan manusia serta keberhasilan perusahaan.

5. Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan dalam mendesain proses produksi, barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan.
6. Perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang didapat dari proses, barang, dan jasa yang bersifat ramah lingkungan. Brand image yang positif akan diberikan oleh masyarakat karena keberhasilan perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa dengan konsep ramah lingkungan (Schaltegger dan Burritt, 2000 dalam Arisandi dan Frisko, 2011). Hal ini berdampak pada segi pendapatan produk, yaitu memungkinkan perusahaan tersebut untuk menikmati diferensiasi pasar, konsumen memiliki kecenderungan untuk bersedia membayar harga yang mahal untuk produk yang berorientasi lingkungan dengan harga premium (Aniela, 2012).
7. Akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung per-kembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara keseluruhan. Sistem seperti ini akan segera menjadi keharusan bagi perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional karena adanya persetujuan berlakunya standar internasional ISO 14001.
8. Pengungkapan biaya lingkungan akan meningkatkan nilai dari pemegang saham karena kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. Pemegang saham perusahaan dapat lebih mudah dan cepat

mendapatkan informasi dari pengungkapan tersebut sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan (Arisandi dan Frisko, 2011).

Selain itu, Alexopoulos et al. (2011) menunjukkan bahwa perbaikan kinerja lingkungan adalah potensi sumber keunggulan kompetitif yang mengarah ke proses yang lebih efisien, peningkatan produktivitas, biaya kepatuhan lebih rendah dan peluang pasar baru. Dengan demikian, mengintegrasikan akuntansi lingkungan ke dalam sistem informasi akuntansi perusahaan sangat penting. Memiliki sistem akuntansi lingkungan yang tepat akan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai hal-hal tersebut. Sistem ini memberikan analisis yang lebih baik atas biaya lingkungan dan dapat mengungkapkan peluang yang mungkin bisa meningkatkan pendapatan antara lain seperti daur ulang dari bahan baku, desain produk dan proses manufaktur yang lebih baik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menekankan pentingnya akuntansi lingkungan dalam suatu organisasi dan untuk bangsa - sebaiknya bersikap 'green' bahwa minimisasi limbah dan skema efisiensi energi dapat dan akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar bagi organisasi.

2.2.2. Komponen Laporan *Green Accounting*

Andreas Lako (2018:103-105) mengatakan bahwa secara umum, komponen-komponen Laporan Akuntansi Hijau atau Laporan Keuangan Hijau tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen laporan keuangan dalam akuntansi keuangan konvensional yang selama ini menjadi basis dan digunakan dalam IAS-IFRS dan SAK. Yaitu aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, biaya, dan laba. Namun ada beberapa akun krusial yang membedakan Akuntansi Hijau dengan akuntansi keuangan konvensional, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam struktur asset entitas yang melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (TJSLP), CSR, dan *green business* akan muncul akun-akun baru seperti asset sumber daya alam, investasi sosial dan lingkungan, investasi hijau, atau investasi CSR dibawah kelompok asset tetap. Secara umum, struktur asset perusahaan dalam konstruksi Akuntansi Hijau meliputi asset lancar, investasi finansial, asset tetap, asset sumber daya alam, investasi sosial dan lingkungan, asset tak berwujud, dan asset lainnya.
2. Dalam struktur akun liabilitas entitas yang melaksanakan TJSLP, CSR, dan korporasi hijau akan muncul akun-akun baru seperti liabilitas sosial dan liabilitas lingkungan yang bersifat kontinjen. Liabilitas sosial kontinjen dan liabilitas lingkungan kontinjen tersebut bias bersifat jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada komitmen perusahaan untuk memenuhinya.
3. Dalam struktur akun-akun ekuitas dari entitas korporasi yang melaksanakan aktivitas CSR yang bersifat sukarela, muncul akun baru yaitu akun donasi CSR, dibawah akun laba rugi periode berjalan.
4. Dalam struktur akun-akun biaya produksi dan biaya operasi entitas yang melaksanakan TJSLP, CSR dan *green business* akan muncul akun-akun biaya baru seperti biaya sosial dan biaya lingkungan, atau biaya penghijauan perusahaan (*greening costs*) yang bersifat periodic atau temporer. Misalnya, biaya bantuan sosial bencana alam, biaya pengelolaan limbah, biaya daur ulang, biaya audit lingkungan, biaya pencemaran, biaya pengendalian polusi, biaya kerusakan lingkungan, biaya pengungkapan informasi sosial-lingkungan.

2.2.6. Biaya Lingkungan

Green cost atau biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya paling nyata dalam mengukur ketidakpastian. Pada dasarnya biaya lingkungan

berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem, atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik (Dewi: 2016).

Definisi biaya lingkungan menurut *Environmental Protection Agency* (EPA) antara lain :

1. Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktivitas perusahaan dalam cara pertanggungjawaban lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan.
2. Biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan dengan seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan.

Ikhsan (2016) menyebutkan bahwa dalam akuntansi lingkungan ada komponen pembiayaan yang harus dihitung, misalnya:

1. Biaya operasionalisasi bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau pembayaran (*fee*) kontrak untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (*recycling*).
2. Biaya daur ulang yang dijual
3. Biaya penelitian dan pengembangan (*Litbang*) yang terdiri dari biaya total untuk material dan tenaga ahli, tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang ramah lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.

Perusahaan dapat mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi maka perusahaan harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan tujuan dari semua energi, air dan bahan yang digunakan. Untuk itu harus diketahui berapa yang digunakan, berapa yang menjadi produk akhir dan berapa yang menjadi limbah. Dalam perhitungan ini ada 2 aspek yang digunakan yaitu aspek fisik dan moneter (IFAC:2005). IFAC menjelaskan masing-masing aspek tersebut sebagai berikut:

1. Data dan informasi fisik

Akuntansi manajemen lingkungan (*environmental management accounting/EMA*) menitik-beratkan pada pemicu biaya berupa data fisik dan input berupa jumlah energi, air dan bahan serta jumlah output berupa limbah dan emisi karena: (1) jumlah energi, air dan bahan yang digunakan serta limbah yang dihasilkan, berhubungan langsung dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan (2) biaya pembelian bahan merupakan komponen biaya yang cukup besar. Secara fisik perusahaan harus menelusuri semua input dan output sehingga semua terhitung.

2. Data dan informasi moneter

Yang dimaksud data moneter adalah semua biaya dan pengeluaran lingkungan lainnya. Pengklasifikasian biaya lingkungan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan informasi oleh manajemen, pelaporan keuangan maupun pelaporan kepada stakeholder. Biaya lingkungan juga dapat dikaitkan dengan nilai moneter yang melekat pada energi, air dan bahan, atau pada pengeluaran untuk pengelolaan lingkungan.

Pengelompokan biaya lingkungan yang dilakukan IFAC dalam adalah sebagai berikut:

Kelompok 1 – Biaya Bahan dan Output Produk. Kelompok ini meliputi biaya pembelian bahan yang akan dikonversi menjadi produk akhir, produk sampingan dan kemasan. Data biaya ini dapat membantu untuk mengelola biaya lingkungan yang berhubungan dengan bahan supaya lebih efektif. Contohnya, perusahaan mengganti bahan baku dengan bahan yang ramah lingkungan.

Kelompok 2 – Biaya Bahan dari Output Non Produk. Kelompok ini meliputi biaya pembelian bahan yang dikonversi menjadi limbah dan emisi yang terdiri atas bahan bakar, air dan energi. Tidak semua limbah dapat dikurangi namun semakin sedikit bahan, energi dan air yang digunakan, akan semakin baik bagi lingkungan.

Kelompok 3 – Biaya Pengendalian Limbah dan Emisi. Yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah: biaya penanganan, perlakuan dan pembuangan limbah dan emisi., biaya perbaikan dan ganti rugi karena kerusakan lingkungan dan semua biaya yang berkaitan dengan pengendalian limbah dan emisi.

Kelompok 4 – Biaya Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Lainnya. Kelompok ini meliputi biaya untuk aktivitas pengelolaan lingkungan yang bersifat mencegah yaitu: biaya pengelolaan supply-chain lingkungan, biaya produksi yang lebih bersih, biaya perencanaan dan sistem, biaya pengukuran lingkungan (pengawasan dan audit) dan biaya lainnya.

Kelompok 5 – Biaya Riset dan Pengembangan. Yang dimaksud kelompok ini adalah biaya aktivitas riset dan pengembangan yang berkaitan dengan isu

inisiatif lingkungan seperti: biaya riset potensi racun/zat berbahaya pada bahan baku, biaya pengembangan produk ramah lingkungan atau hemat energi, biaya uji coba desain peralatan baru, yang dapat menghemat penggunaan bahan baku.

Kelompok 6 – Biaya Tak Berwujud. Kelompok ini adalah biaya internal dan eksternal yang sulit teridentifikasi namun nilainya berpotensi signifikan. Contohnya: kewajiban seperti biaya kerusakan alam, biaya regulasi atau biaya di masa yang akan datang akibat efek gas rumah kaca, biaya produktivitas seperti biaya ketidakhadiran pekerja karena sakit akibat polusi, biaya pembentukan image dan hubungan dengan stakeholder dan biaya eksternalitas yaitu pengaruh eksternal terhadap masyarakat seperti penurunan nilai properti karena dekat dengan pabrik.

Hansen dan Mowen, (2007), mengelompokkan biaya lingkungan menjadi:

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention cost*)

Yaitu biaya yang timbul dari aktivitas untuk mencegah kotoran dan limbah produksi merusak lingkungan. Contoh: biaya mendesain proses/produk yang dapat meminimalkan atau menghilangkan polusi, biaya studi dampak lingkungan dan sebagainya.

2. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection cost*)

Yaitu biaya yang timbul dari aktivitas untuk menjadikan produk, proses, dan aktivitas lain dalam perusahaan memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Contoh: biaya audit aktivitas lingkungan, biaya melakukan uji, polusi dan sebagainya.

3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure cost*)

Yaitu biaya yang timbul dari aktivitas yang dilakukan karena kotoran dan limbah telah dihasilkan namun belum dibuang ke lingkungan sekitar perusahaan. Contohnya: biaya pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya, biaya daur ulang sisa bahan dan sebagainya.

4. Biaya kegagalan lingkungan

Yaitu biaya yang timbul setelah kotoran dan limbah dibuang ke lingkungan sekitar perusahaan. Biaya ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Biaya kegagalan eksternal yang terealisasi

Yaitu biaya yang ditanggung dan dibayar oleh perusahaan. Contoh: biaya konservasi lahan yang rusak, biaya pembersihan lingkungan yang tercemar dan sebagainya.

b. Biaya kegagalan eksternal yang tidak terealisasi

Yaitu biaya yang ditanggung dan dibayar oleh pihak lain di luar perusahaan dan tidak termasuk dalam kelompok biaya lingkungan yang harus diakui atau dibebankan ke perusahaan walaupun timbulnya biaya tersebut disebabkan oleh perusahaan, biasanya secara tidak langsung. Biaya ini disebut juga biaya sosial. Contoh: biaya pengobatan warga yang sakit akibat terkena polusi akibat aktivitas perusahaan, biaya kehilangan lingkungan yang sehat dan sebagainya.

Pencatatan dalam akun untuk biaya lingkungan (unit moneter) dilakukan sebagaimana halnya yang dilakukan dalam akuntansi tradisional. Sementara untuk unit fisik menggunakan ukuran satuan yang disesuaikan dengan bahan atau dampak yang ditimbulkannya. Pengelompokan menurut

Hansen dan Mowen ini sangat tepat untuk jika dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja lingkungan karena fokus pada pencegahan sebelum kerusakan terjadi dibandingkan penanganan.

2.2.3. Pengukuran Green Accounting

Andreas Lako (2011) menyatakan bahwa belum terdapat pengukuran secara pasti untuk merumuskan bagaimana metode pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan penyajian akuntansi lingkungan di sebuah perusahaan. Pengukuran akuntansi lingkungan yang baik akan berakibat pada kinerja lingkungan yang baik juga. Pengukuran green accounting ini dapat dilihat dari kinerja lingkungan perusahaan. Menurut Suratno, dkk (2006) kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green).

Saat ini akuntansi lingkungan dapat diukur melalui 2 cara, yaitu dengan menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) atau dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

A. Pengukuran Menggunakan Proper

Kinerja lingkungan perusahaan diukur dari prestasi perusahaan yang mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dalam:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah hingga yang terburuk hitam untuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada. Kriteria penilaian PROPER yang lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut:

1. Emas; Sangat baik; Skor 5

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

2. Hijau; Baik; Skor

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik.

3. Biru; Cukup; Skor 3

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Merah; Buruk; Skor 2

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.

5. Hitam; Sangat Buruk; Skor 1

Untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

B. Pengukuran Menggunakan GRI

Global Reporting Initiative (dikenal sebagai GRI) adalah sebuah organisasi standar internasional independen yang membantu bisnis, pemerintah dan organisasi lainnya memahami dan berkomunikasi dampaknya terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia dan korupsi. Di bawah tekanan yang meningkat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan - seperti pemerintah, konsumen dan investor - untuk lebih transparan tentang dampak lingkungan, ekonomi dan sosial mereka, banyak perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan , juga dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau lingkungan, sosial dan laporan tata kelola (ESG). Kerangka kerja GRI untuk

pelaporan keberlanjutan membantu perusahaan mengidentifikasi, mengumpulkan dan melaporkan informasi ini dengan cara yang jelas dan dapat dibandingkan. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2000, kerangka pelaporan keberlanjutan GRI sekarang paling banyak digunakan. (Esben RG, 2015: 107).

Kerangka kerja GRI bertujuan untuk memungkinkan pihak ketiga untuk menilai dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dan rantai pasokannya. Pedoman pelaporan terstandar mengenai lingkungan terdapat dalam Perangkat Protokol Indikator GRI. Indikator kinerja (PI) mencakup kriteria energi, keanekaragaman hayati dan emisi. Ada 30 indikator lingkungan mulai dari EN1 (bahan yang digunakan berdasarkan berat) hingga EN30 (total pengeluaran lingkungan berdasarkan jenis investasi). Pedoman 3.1 telah diperbarui oleh pedoman 4.0 berbasis materialitas pada tahun 2014, menghasilkan beberapa komentar mengenai perbandingan.

Saat ini standar GRI versi terbaru G4 telah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat.

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau pelaporan online. Dalam standar GRI-

G4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Kategori sosial mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan, dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator yang terdapat dalam GRI mencapai 91 item.

Standar GRI mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial kepada publik. Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada Standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi bagi pembangunan berkelanjutan. Standar GRI modular yang saling terkait ini dirancang terutama untuk digunakan sebagai satu set dokumen guna menyiapkan laporan keberlanjutan yang berfokus pada topik material. Ketiga Standar universal tersebut digunakan oleh setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan. Setiap organisasi itu juga memilih dari Standar topik spesifik untuk melaporkan topik materialnya - ekonomi, lingkungan atau sosial.

Menyiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI memberikan gambaran inklusif tentang topik material organisasi, dampak terkaitnya, dan bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. Organisasi juga dapat menggunakan semua atau sebagian dari Standar GRI untuk melaporkan informasi spesifik. Standar GRI terbagi menjadi beberapa seri, antara lain:

- 1. GRI Seri 100.** Seri 100 Standar GRI mencakup tiga Standar universal yang dapat diterapkan oleh setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan. Seri ini menjadi panduan bagi pelapor dalam menggunakan

Standar, melaporkan informasi kontekstual organisasi yang relevan, dan melaporkan cara pengelolaan topik materialnya.

2. **GRI seri 200.** Seri 200 Standar GRI mencakup Standar topik spesifik yang digunakan untuk melaporkan informasi tentang dampak material organisasi terkait topik ekonomi.
3. **GRI seri 300.** Seri 300 Standar GRI mencakup Standar topik spesifik yang digunakan untuk melaporkan informasi tentang dampak material organisasi terkait topik lingkungan.
4. **GRI seri 400.** Seri 400 Standar GRI mencakup Standar topik spesifik yang digunakan untuk melaporkan informasi tentang dampak material organisasi terkait topik sosial.

(www.globalreporting.org)

2.3. Peraturan Yang Terkait Dengan *Green Accounting*

Terdapat beberapa peraturan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan setiap pemilik usaha atau badan maupun perseroan untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya atas lahan dan lingkungan yang digunakan dalam menjalankan operasi perusahaan.

- A. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga

telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- B. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU ini diatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggung-jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.
- C. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ini mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan perhitungan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjelaskan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dengan peraturan undang-undang tersebut

menimbulkan kesukarelaan dari perusahaan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan karena kepedulian yang timbul akan keberlangsungan hidup makhluk hidup dan perusahaan itu sendiri.

- E. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP- 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

